**BAB V**

**KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

**5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana gempa bumi dan tsunami di Kecamatan Cipatujah dengan jumlah skoring 107 dan Kecamatan Karangnunggal dengan jumlah skoring 96 artinya kecamatan ini berada dalam kondisi siap. Sedangkan Kecamatan Cikalong dengan jumlah skoring 91 berada dalam kondisi cukup siap. Dalam 5 (lima) faktor kesiapsiagaan masyarakat yang sudah ditentukan ada beberapa 2 (dua) faktor yang nilainya termasuk kedalam kriteria baik ataupun sangat baik, diantaranya faktor sistem peringatan bencana dan modal sosial. Untuk faktor mobilisasi sumberdaya dan rencana tanggap darurat termasuk dalam kriteria cukup dan kurang. Sedangkan faktor pengetahuan dan sikap masuk dalam kriteria tidak baik. Masyarakat masih mengandalkan sistem peringatan bencana yang tradisional, namun masyarakat sudah mengerti informasi yang akan diberikan oleh tanda peringatan bencana tersebut atau tahu apa yang harus dilakukan jika suatu saat tanda peringatan bencana berbunyi. Pada faktor modal sosial masyarakat memiliki ikatan sosial yang lebih baik antara satu dengan yang lainnya dan akan lebih mudah dalam melakukan kesiapsiagaan yang ada. Selain itu modal sosial yang baik diantara masyarakat di wilayah yang rentan terhadap bencana akan mengurangi kerentanan itu sendiri. Modal sosial yang solid antara penduduk akan mempermudah masyarakat dalam melakukan mobilisasi pada saat evakuasi akan dilakukan.
2. Untuk hubungan nilai kesiapsiagaan masyarakat dengan upaya pemerintah mengenai kesiapsiagaan bencana sudah ada yang sesuai walaupun ada beberapa yang belum sesuai. Hal ini di buktikan karena masyarakat sudah menyediakan kebutuhan-kebutuhan dasar walaupun masyarakat belum tahu apa yang akan dilakukan ketika terjadi bencana. Untuk lokasi evakuasi masyarakat sudah tahu karena rambu-rambu dan jalur evakuasi tersebar di sepanjang jalan di pantai Cipatujah. Namun rambu-rambu, jalur dan lokasi evakuasi masih sangat jarang ditemui di beberapa desa di Kecamatan Cikalong dan Kecamatan Karangnunggal. Simulasi tentang kesiapsiagaan sudah pernah diberikan sekali namun yang mengikuti hanya sedikit dan pemerintah perlu mensosialisasikan lebih giat lagi bila nanti ada simulasi kesiapsiagaan lagi.

202

1. Untuk arahan jalur evakuasi memang sudah ada jalur evakuasi di Wilayah Pesisir Kabupaten Tasikmaalaya, namun rambu-rambu evakuasi maupun lokasi evakuasi masih sangat sedikit dan susah dijangkau oleh masyarakat terutama di Kecamatan Cikalong dan Kecamatan Karangnunggal. Oleh karena itu perlu adanya penambahan rambu-rambu dan lokasi evakuasi agar mudah dijangkau oleh masyarakat. Serta perlu adanya penambahan pos pemadam kebakaran di Kecamatan Cipatujah dan Kecamatan Cikalong karena kantor pemadam kebakaran hanya ada di Jalan Siliwangi di Kota Tasikmalaya sehingga sulit berkomunikasi bila terjadi bencana di daerah. Hal ini disebabkan karena jangkauan wilayahnya cukup jauh di kabupaten, tapi lokasi atau tempat damkar berada di wilayah kota.
   1. **Rekomendasi**

Berdasarkan hasil analisis dan temuan studi yang telah dikemukakan, terdapat beberapa rekomendasi mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat Wilayah Pesisir Kabupaten Tasikmalaya terhadap bencana. Rekomendasi berdasarkan penilaian indikator kesiapsiagaan masyarakat pada masing-masing kecamatan di Wilayah Pesisir Kabupaten Tasikmalaya, antara lain :

* Perlu adanya penambahan pos pemadam kebakaran di Desa Padawaras Kecamatan Cipatujah dan Desa Singkir di Kecamatan Cikalong.
* Masyarakat menambah informasi mengenai tindakan penyelamatan saat terjadi bencana, serta mempelajari akibat-akibat yang ditimbulkan oleh bencana dari berbagai sumber yang ada seperti siaran berita, secara mandiri.
* Masyarakat menyiapkan rencana atau mulai memikirkan sebaiknya akan mengungsi kemana jika terjadi bencana gempa dan/atau tsunami serta menyiapkan perlengkapan darurat dan surat-surat berharga dalam satu wadah/tas sehingga mudah dibawa jika sampai terjadi bencana.
* Masyarakat dapat menambah keterampilan untuk kondisi darurat bencana seperti pertolongan pertama (P3K) dan keterampilan evakuasi sehingga tidak harus bergantung kepada tim penyelamat dan jumlah korban jiwa dapat ditekan.
* Masyarakat berpartisipasi jika terdapat pelatihan kesiapsiagaan bencana. Paling tidak setiap keluarga pernah satu kali mendapatkan materi tentang kesiapsiagaan bencana dan terdapat satu orang anggota keluarga yang memahami apa yang harus dilakukan ketika tejadi bencana.
* Mempersiapkan tabungan atau alokasi dana, terutama untuk kondisi darurat seperti bencana.
* Mengoptimalkan sarana-sarana yang ada untuk peringatan bencana dan penyebaran informasi mengenai bencana seperti speaker mesjid/ musholla serta mengembangkan kembali budaya kentongan di lingkungan masyarakat untuk keadaan-keadaan darurat karena tidak adanya sistem peringatan bencana.
* Masyarakat dapat melakukan upaya kesiapsiagaan secara mandiri di lingkungan RT/RW, seperti berkoordinasi untuk penentuan lokasi evakuasi, bersama-sama menentukkan lokasi evakuasi yang sekiranya aman dan mudah dijangkau saat terjadi bencana dan dengan bantuan pemerintah bergotong royong memperbaiki jalur evakuasi jika jalur tersebut rusak.

Selain itu antar pemerintah kecamatan di Wilayah Pesisir Kabupaten Tasikmalaya, serta pemerintah dearah dan provinsi dapat dilakukan kerjasama dalam menghadapi kemungkinan bencana. Kerjasama dapat dilakukan antara lain dalam menentukan lokasi evakuasi atau lokasi posko bencana bersama, koordinasi penyediaan perlengkapan darurat bencana, dan membangun sistem peringatan dini tsunami yang dapat diakses oleh seluruh kecamatan di Wilayah Pesisir Kabupaten Tasikmalaya. Upaya tersebut antara lain :

* Pemerintah kecamatan menambahkan publikasi melalui media mengenai upaya-uapaya apa yang harus dilakukan jika terjadi bencana di tempat-tempat umum, terutama di pelabuhan perikanan, dan daerah wisata yang berada di pinggir pantai. Selain itu hendaknya dilakukan sosialisasi lokasi-lokasi evakuasi dimana saja yang sudah disiapkan pemerintah, anatara lain melalui sosialisasi peta lokasi evakuasi kepada masyarakat umum.
* Pemerintah dapat mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mempertimbangkan risiko bencana gempa bumi dan tsunami saat mendirikan bangunan di kecamatan ini.
* Pemerintah kecamatan dapat bekerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki peralatan peringatan dini seperti BAKOSURTANAL sehingga pemerintah juga dapat menerima informasi secara langsung untuk kemudian diteruskan kepada masyarakat.
* Pemerintah kecamatan dapat mengajak tokoh-tokoh masyarakat seperti ulama, ketua RT, atau tokoh lainnya yang disegani untuk bekerjasama mensosialisasikan kesiapsiagaan bencana, terutama untuk penduduk usia tua yang tidak lebih siap siaga terhadap bencana. Jika latihan kesiapsiagaan bencana yang dilakukan pemerintah terkesan sangat formal dan justru membuat takut masyarakat akan potensi bencana maka melalui tokoh masyarakat diharapkan sosialisasi dapat berjalan lebih alami karena tokoh-tokoh ini umumnya memiliki kemampuan untuk melebur dengan masyarakat lebih baik.
* Pemerintah harus menambahkan rambu-rambu evakuasi, jalur evakuasi dan lokasi evakuasi agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat terutama ditempat stategis seperti di tempat wisata. Terutama di sepanjang pantai di Kecamatan Cikalong terutama di Desa Mandalajaya, Desa Cikadu dan Desa Sindangjaya yang rambu-rambu, jalur dan lokasi evakuasi jarang ditemui.
* Upaya kesiapsiagaan sebaiknya dilakukan secara menyebar di tingkat-tingkat kecamatan dengan skala kegiatan yang lebih kecil dan dilakukan secara berkelanjutan. Intensitasnmya tidak perlu terlalu sering asalkan dilakukan secara berkala hingga masyarakat secara mandiri mampu menyiapkan keluarganya terhadap kemungkinan bencana
* Menambah alokasi anggaran untuk kegiatan penanggulangan prabencana di tingkat kabupaten.
* Mengupayakan kesiapsiagaan masyarakat agar dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Hal yang dapat dilakukan pemerintah agar kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dapat bertahan lebih lama adalah dengan memasukkan materi kesiapsiagaan bencana ke dalam lembaga pendidikan (contohnya dalam bentuk muatan lokal) mengenai potensi bencana yang ada di wilayahnya serta bagaimana cara menghadapinya. Materi yang diberikan tidak perlu dalam jumlah yang banyak tetapi diberikan secara bertahap sehingga masyarakat, terutama siswa, menjadi terbiasa dan mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi bencana. Disamping itu siswa diharapkan dapat mensosialisasikan materi tersebut kepada keluarga dirumah dan yang lainnya.
* Pemerintah dapat mengajak masyarakat untuk turut bermusyawarah/ memberi masukan apa yang sebaiknya pemerintah lakukan untuk upaya kesiapsiagaan bencana. Dalam hal ini pemerintah dapat belajar dari pengalaman masyarakat dalam menghadapi bencana sebelumnya dan bukan tidak mungkin akan ditemukan strategi baru terkait penanggulangan bencana dari masyarakat berdasarkan pengalaman masyarakat tersebut.
* Pemerintah dapat menyiapkan kebijakan pendidikan kesiapsiagaan masyarakat, baik melalui kurikulum di sekolah dan pendidikan kesiapsiagaan masyarakat secara umum serta menambah intensitas kegiata penanggulangan prabencana, seperti melalui pendidikan kesiapsiagaan bencana.
* Penyediaan dan pemutakhiran data, terutama di tingkat desa, baik data kependudukan, fisik, sosial, ekonomi maupun data infrastruktur yang ada.
* Pemerintah dapat mengajukan usul ke tingkat provinsi untuk bekerja sama dengan pihak media terkait pendidikan kesiapsiagaan masyarakat. Hal ini disebabkan masyarakat banyak yang mengakses informasi mengenai bencana melalui siaran TV nasional dan banyak yang menyebutkan berita TV sebagai sumber mereka dalam mendapatkan informasi mengenai bencana.
  1. **Kelemahan Studi**

Studi tentang Identifikasi Kesiapsiagaan Masyarakat di Wilayah Pesisir Kabupaten Tasikmalaya Terhadap Bencana Gempa Bumi dan Tsunami ini tidak terlepas dari beberapa keterbatasan dalam proses maupun keluaran yang dihasilkan. Keterbatasan tersebut adalah :

1. Tidak dilakukan perhitungan tingkat kerentanan, ketahanan dan risiko bahaya gempa bumi dan tsunami
2. Studi ini tidak menitik beratkan terhadap aspek teknis seperti, penghitungan pembiayaan, desain dan lain-lain
3. Tidak dilakukan analisis lokasi dalam menentukan tempat yang tepat untuk permukiman kembali setelah terjadinya bencana gempa bumi dan tsunami